

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

- Abdul Kadir, Muhamad. 1992 *Hukum Perikatan*. Citra Aditya, Bandung
- Badruzaman, Mariam Darius. 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Daliyo, J.B. 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. PT. Pernhallindo, Jakarta
- Fuady, Munir. 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta
- Harsono Boedi. 2008, *Hukum Agraria Indonesia : Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djembatan, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta
- Miru, Ahmadi dan Sakka Pati. 2012, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Rajawali Pers, Jakarta
- Patrik, Purwahid. 1994, *Dasar-dasar Hukum Perikatan*, Mandar Maju, Bandung
- Prasetya, Rudhi. 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta
- R. Setiawan. 1987, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina cipta, Jakarta
- Samuel M.P Hutabarat. 2010, *Penawaran dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Santoso, Urip. 2012, *Hukum Agraria Kajian Komperhensif*, Kencana Pernanda Media Group, Jakarta.
- S.T.Kansil, Christine. 2001, *Pokok-pokok Badan Hukum*, CV.Muliasari, Jakarta.
- S.T.Kansil, Christie. 2002 *Pokok-pokok Badan Hukum Yayasan-Perguruan Tinggi-Koperasi-Perseroan Terbatas*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Subekti, 2001, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermedia, Jakarta
- Subekti. 1987, *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT. Intermedia. Jakarta
- Supramono, Gatot. 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Syaifuddin Muhammad. 2012, *Hukum Kontrak*, Mandar Maju, Bandung

Syarief, Elza. 2012, *Menuntaskan Sengketa Tanah*. Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta.

Sunggono Bambang, 1997, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah

Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 1994 Tentang Tata Cara Perolehan Tanah Bagi Perusahaan Dalam Rangka Penanaman Modal

## **C. Artikel :**

Harsono, Boedi. 2002, *Menuju Penyempurnaan Hukum Tanah Nasional dalam Hubungannya dengan TAP MPR RI IX/MPR/2001*, Hak Ulayat Masyarakat Hukum adat adalah “ *Serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat Hukum Adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya*”. Jakarta: Universitas Trisakti.